

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perhubungan merupakan salah satu sektor yang dapat mendukung pendapatan negara. Apabila potensinya dapat di kelola dan di kembangkan dengan baik, maka akan memberi dampak terhadap perkembangan Masyarakat disekitarnya baik dari segi ekonomi dan infrastruktur yang bermuara pada kesejahteraan.

Perkembangan yang dialami oleh Kabupaten Bone Bolango tak luput dari adanya interpretasi dari sektor Perhubungan yang memadai, Sektor yang terus dibenahi dari segi sarana dan prasarananya, sehingga memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat.

Ditinjau dari aspek kebutuhan daerah akan adanya peningkatan dibidang transportasi, keamanan, keselamatan serta ketertiban dalam berkendara, tentunya hal dimaksud tak lepas dari sektor perhubungan sebagai pelaksana utama yang harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Bidang Perhubungan tentunya telah mampu dalam melaksanakan tugasnya sebagai salah satu kebutuhan masyarakat di jalan raya yang erat kaitannya dengan infrastruktur sebagai penunjang utama.

Unsur yang ada tersebut yang pada intinya mampu memenuhi tuntutan kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat, tentunya bermuara pada hasil serta target yang harus dicapai melalui program serta kegiatan yang ada.

Kabupaten Bone Bolango yang merupakan penjabaran dan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango.

Dinas Perhubungan merupakan salah satu unsur penunjang pemerintah di daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi beberapa kepala bidang serta yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango sebagai komponen operasional memfasilitasi pelaksanaan kebijakan peraturan Perhubungan di daerah sebagaimana yang diterapkan dalam pola Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango yang tak lepas dari Visi dan Misi Kepala Daerah.

Dalam konteks pemikiran tersebut, maka diperlukan rencana strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 sebagai panduan operasional yang visioner.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Idiil dari Rencana Strategis ini adalah Pancasila dan landasan konstitusional UUD 45, sedangkan landasan pelaksanaannya mencakup semua ketentuan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2017 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango yang merupakan penjabaran dan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango.
2. Undang-undang nomor 14 Tahun 1993 tentang lalu lintas angkutan jalan yang telah disempurnakan dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 2009
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang telah beberapa kali

- mengalami perubahan dan terakhir dengan Kepres Nomor 09 Tahun 2004
7. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005-2025.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi
 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 12. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 07 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang disusun sebagai bahan acuan yang menjadi indikator kinerja dalam pelaksanaan pembangunan Dinas Perhubungan selama 5 tahun dengan tujuan agar proses manajemen dapat berjalan dengan tertib, efektif dan efisien dalam melaksanakan tupoksi dengan mengantisipasi atas prediksi perkembangan lima tahun kedepan, maka Renstra di susun dengan kandungan Visi, Misi, Sasaran, Kebijakan program dan kegiatan indikatif.

1.4 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan

1. Memperhatikan Kebijakan serta Prioritas Bidang Perhubungan dalam Program Pembangunan Daerah
2. Memenuhi kriteria visi dan misi daerah.

3. Memperhatikan RPJMD Daerah

1.5 Sistematika Penulisan Renstra

Sistematika penulisan Renstra ini terdiri atas :

1. Bab I. PENDAHULUAN

Terdiri atas, Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

2. Bab II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD.

Terdiri atas Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan peluang pelayanan SKPD.

3. Bab III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Terdiri atas: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaah Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih, Telaah RTRW dan KLHS, Penentuan Isu-Isu Strategis

4. Bab IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Terdiri atas: Visi Dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD

5. Bab V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6. Bab IV. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD

7. Bab VI. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur. Perubahan-perubahan tersebut bertujuan agar pelayanannya dapat lebih optimal sesuai dengan berkembangnya waktu, adapun struktur organisasi sebagai berikut:

Bagan 1.
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten Bone Bolango

A. Tugas dan Fungsi

1. Penjabaran tugas, fungsi dan kewenangan dinas :

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang didasari oleh peraturan daerah serta tugas penunjang pada bidang Perhubungan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud diatas, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonom daerah di bidang Perhubungan
- b. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan fungsinya , Kepala Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan akan tugas pada Bidang Perhubungan.
- b. Penyelenggaraan tata aturan transportasi.
- c. Memberikan izin, surat keterangan maupun rekomendasi pada pengusaha jasa pada ketiga bidang didalamnya.
- d. Mengawasi jalannya program serta kegiatan yang telah ditetapkan.
- e. Melaksanakan capaian target yang telah ditentukan.

2.2 Sumber Daya SKPD

Sebagai ketetapan serta berkewajiban dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango berlandaskan pada ketersediaan sarana dan prasarannya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan untuk Tahun 2016 didukung oleh aparatur dengan susunannya sebagai Berikut :

Pegawai	JML ORG
Jabatan Struktural :	
- Golongan IV	6 Orang
- Golongan III	12 Orang
- Golongan II	12 Orang
- Golongan I	3 Orang

a) Gambaran Umum Aparatur

Dilihat dari segi kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango sekarang ini masih kurang dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Demikian pula halnya bila ditinjau dari kualitas dengan menggunakan tolak ukur pendidikan formal dan dengan mempertimbangkan tuntutan kompetensi seorang pegawai dalam menangani bidang tugasnya, maka memang masih perlu ditingkatkan, selain faktor kuantitas dan kualitas yang perlu mendapat perhatian adalah penempatan aparatur sesuai dengan kompetensinya (the right man in the right place). Untuk kapasitas sumber daya aparatur yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut :

Tabel Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Diklat Teknis dan Penjurangan (Per 3 Januari 2017)

No	Diklat Teknis	Jumlah
1	Pengujian Kendaraan Bermotor	2 Orang
2	PPNS	2 Orang
3	Pengadaan Barang dan Jasa	2 Orang

No	Diklat Penjenjangan	Jumlah
1	Diklat PIM IV	
2	Diklat PIM III	3 Orang
3	Diklat PIM II	

Tabel Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Tingkat Pendidikan (per 3 Januari 2017)

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana	5 Orang
2	Sarjana	9 Orang
3	Diploma	4 Orang
4	SLTA	12 orang
5	SLTP	2 Orang
6	SD	1 Orang

Tabel Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Jabatan Struktural (per 3 Januari 2017)

No	Jabatan Struktural	Jumlah
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	4 Orang
3	Eselon IV	8 Orang

Dari Total jumlah pegawai sebanyak 33 Orang,terdapat pegawai laki laki sebanyak 22 orang sedangkan pegawai wanita sebanyak 11 orang,berdasarkan jabatan Struktural,dari 3 orang eselon III terdapat 3 orang Laki-laki,Sementara dari 6 orang eselon IV terdapat 2 orang wanita pejabat eselon IV. Dalam meningkatkan kompetensi SDM di Dinas Perhubungan maka terdapat beberapa pegawai yang telah mengikuti diklat/bimtek teknis sesuai dengan tupoksi masing masing. Sampai dengan tahun 2016 presentase jumlah pegawai Dinas Perhubungan yang telah

mengikuti diklat teknis adalah sebesar 6 Pegawai. Kemudian untuk tenaga kontrak berjumlah 30 Orang.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango bertempat Jln. Aroman Wartabone kompleks pasar rabu yang dengan ini diharapkan akan menunjang pelayanan jasa perhubungan. Kemudian dari segi prasarana, Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango memiliki 16 unit kendaraan roda dua dan 2 unit kendaraan roda empat.

Tabel 2.3.1 Kendaraan Dinas/Operasional

No	Kendaraan Dinas	Jumlah
1	Operasional Roda Empat	2 unit
2	Bus	6 Unit
3	PDT	15 Unit
4	Operasional Roda Dua	

Selain prasarana di atas, dalam mengoptimalkan kinerja, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango telah mengusahakan secara bertahap pengadaan komputer dalam rangka persiapan komputerisasi dalam proses administrasi dan sistem informasi. Pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bone Bolango terdapat pelayanan SKPD yang berhubungan langsung dengan masyarakat yaitu pelayanan izin trayek dan Pengujian KIR Kendaraan.

Pengambilan keputusan manajerial yang tepat dan cepat serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, keterbukaan dan pelayanan prima, merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango untuk itu perlu ditunjang dengan sistem informasi manajemen dengan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin maju. Selama ini Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango telah mengusahakan secara bertahap pengadaan komputer dalam

rangka persiapan komputersasi dalam proses administrasi dan sistem informasi.

Kemudian untuk Prasarana dan Sarana terhadap pelayanan masyarakat dapat dilihat sebagai berikut :

1. Manajemen Transportasi :
 - a. Pengoperasian Bus angkutan siswa yang dioperasikan untuk membantu siswa untuk menuju ke lokasi sekolah. Adapun rute Bus angkutan siswa ini berada di kec. Bone dan kec. Kabila Bone
 - b. Untuk perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas ditahun mendatang, pada tahun 2015 telah disusun :
 - DED Balai Uji Kendaraan
2. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana transportasi, berupa pemasangan rambu-rambu, marka serta fasilitas lainnya sebagai berikut :
 - a. Rambu-rambu lalu lintas, sampai dengan tahun 2016 terpasang sebanyak 895 Buah
 - b. Pembuatan marka jalan, sampai dengan tahun 2016 sebanyak 37.349 m
3. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas di Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan guna memperlancar arus lalu lintas diruas jalan pada hari-hari biasa maupun hari libur melalui kegiatan-kegiatan :
 - a. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya
 - b. Pengawasan kegiatan pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui Tim Reaksi Cepat
4. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagai salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Provinsi Gorontalo memiliki potensi untuk berkembang dan bersaing dengan daerah lain dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan khususnya mengenai transportasi darat. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mengupayakan sumber-sumber penerimaan

pendapatan asli daerah melalui jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, yang di selenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango yang diharapkan dapat memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang terbaik serta memberikan kontribusi pada penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) guna menopang pembiayaan pelaksanaan pembangunan yang ada di bidang perhubungan transportasi darat.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan dalam menjalankan fungsinya pada bidang perhubungan, manajemen lalu lintas, dan Perbungan Laut tentunya tidak lepas dari berbagai permasalahan yang di hadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang di hadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini menggunakan metode SWOT Analisi. Dalam Analisis SWAT lingkungan Internal meliputi Strength (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan). Sedangkan lingkungan Eksternal meliputi Oppurtunity (peluang) dan Treaths (ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain :

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Tersedianya dasar hukum sebagai landasan operasional baik berupa perundang-undngan maupun perturn daerah
- 2) Tersedianya struktur organisasi dan tata kerja
- 3) Tersedianya SDM Dinas Perhubungan yang cukup memadai
- 4) Terjalinnya hubungan kerja yang baik dengan stake holder perhubungan

- 5) Tersedianya jaringan internet untuk keperluan akses informasi
- b. Kelemahan (Weaknesses)
- 1) Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki sertifikat pengujian
 - 2) Masih kurangnya pelaksanaan diklat untuk meningkatkan kemampuan SDM
 - 3) Masih kurangnya sarana dan prasarana di bidang Perhubungan dan manajemen lalu lintas

2. Lingkungan Eksternal

- a. Peluang (Opportunity)
- 1) Perkembangan teknologi informasi untuk keperluan analisis data
 - 2) Tersedianya utilitas yang memadai (fasilitas RS, Bank, Kantor Pos, Listrik, Air Bersih dll)
 - 3) Kondisi keamanan di Kabupaten Bone Bolango cukup menunjang
 - 4) Tingkat kemacetan arus kendaraan masih minim
- b. Ancaman (Threat)
- 1) Masih kurangnya pelaksanaan diklat untuk meningkatkan kemampuan SDM
 - 2) Masih kurangnya sarana dan prasana penunjang di bidang perhubungan darat dan laut
 - 3) Belum memadainya infrastruktur jalan.

Dari hasil inventarisasi isu-isu strategis tersebut, di coba untuk dilakukan analisa terhadap isu-isu strategis tersebut yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

MATRIKS KEKUATAN

NO	INDIKATOR	SKOR
1	Tersedianya dasar hukum sebagai landasan operasional baik berupa perundang-undangan maupun peraturan daerah	5
2	Tersedianya jaringan internet untuk keperluan akses informasi	3
3	Tersedianya struktur organisasi dan tata kerja	4
4	Tersedianya SDA Dinas Perhubungan yang cukup memadai	3
5	Terjalannya hubungan kerja yang baik dengan stake holder perhubungan	3
JUMLAH		18

MATRIKS KELEMAHAN

NO	INDIKATOR	SKOR
1	Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki sertifikat pengujian	4
2	Masih kurangnya pelaksanaan diklat untuk meningkatkan kemampun SDM	4
3	Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang di bidang Perhubungan dan Manajemen Lalu Lintas	4
4	Tersedianya sarana kerja yang memadai untuk menunjang	3
JUMLAH		15

MATRIKS PELUANG

NO	INDIKATOR	SKOR
1	Perkembangan teknologi informasi untuk keperluan analisis data	5

2	Tersedianya utilitas yang memadai (fasilitas RS, Bank, Kantor Pos, Listrik, Air Bersih dll)	4
3	Kondisi keamanan di Kabupaten Bone Bolango cukup menunjang	3
4	Tingkat kemacetan arus kendaraan masih minim	3
5	Peningkatan PAD	4
6	Tersedianya Lahan Pembangunan Balai Pengujian	4
7	Tersedianya sarana Transportasi untuk Pelajar	4
JUMLAH		27

MATRIKS ANCAMAN

NO	INDIKATOR	SKOR
1	Masih kurangnya pelaksanaan diklat untuk meningkatkan kemampuan SDM	5
2	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesadaran berlalu lintas	4
3	Masih kurangnya sarana dan prasana penunjang di bidang perhubungan darat dan laut	4
JUMLAH		13

BAB III**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI****3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, Permasalahan tersebut antara lain :

1. Masih belum memadainya sarana dan prasarana pada bidang Manajemen Lalu Lintas
masih tingginya angka lakalantas di kab. bone bolango tidak terlepas dari masalah belum memadainya sarana dan prasarana. terbatasnya ketersediaan fasilitas pelayanan lalulintas menjadi penyebab utama.
2. Masih belum memadainya sarana dan prasarana pada bidang Perhubungan
banyaknya kendaraan umum yang tidak layak beroperasi di Kab. Bone Bolango merupakan wujud dari belum memadainya sarana dan prasarana dalam hal ini belum tersedianya balai pengujian kendaraan bermotor. tidak adanya balai uji berserta alat pengujian mengakibatkan sulitnya penetapan kelayakan kendaraan itu sendiri.
3. Rendahnya kompetensi SDM di bidang perhubungan
Sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas yang di harapkan mempunyai daya saing tinggi ternyata masih jauh dari kata memadai. kurangnya SDM yang memiliki sertifikasi pengujian serta kurangnya diklat menjadi penyebab utama rendahnya kompetensi SDM

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat

eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

adapun visi Kepala Daerah terpilih yaitu " **TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENUJU KABUPATEN BONE BOLANGO CEMERLANG DAN SEJAHTERA 2021** "

1. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui keberadaan dan peran instansi pemerintahan. Adapun misi kabupaten bone bolango :

- Misi pertama :

Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan Infrastruktur sebagai basis pengembangan wilayah.

- Misi Kedua :

Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Perlindungan Sosial dengan Melakukan Pemerataan dan Penyeimbangan Pembangunan Secara Berkelanjutan untuk Mengurangi Kemiskinan, Kesenjangan Ekonomi, Sosial, Politik dan Budaya.

- Misi ketiga :

Mewujudkan Pembangunan Sektor dengan Bertumpu Pada Pencapaian Daya Saing Kompetitif Berlandaskan Keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Berkualitas.

- Misi keempat :

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Moderen dengan Mengedepankan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut Dinas Perhubungan dan Pariwisata sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati

dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan dalam melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut. Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bone Bolango mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonom daerah di bidang Perhubungan
- b. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI DAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA PROVINSI GORONTALO

A. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan RI

Visi : “Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”

Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (confortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Pelayanan transportasi yang berdaya saing didedikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang Profesional, Mandiri dan Produktif.

Pelayanan transportasi yang memberikan nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Misi

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah.
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi.
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten.
5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 Rencana Struktur Ruang

3.4.1.1 Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Rencana pengembangan sistem perkotaan dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango diarahkan pada:

1. Menata dan mengarahkan perkembangan pusat-pusat kegiatan di bagian timur (Suwawa), Barat (Kabila), dan Utara (Tapa)

2. Mengembangkan secara terbatas pusat-pusat kegiatan di bagian selatan (Bone Pantai).
3. Menata distribusi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Sub Pusat Kegiatan Lokal (PPK) yang mendukung keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antarwilayah

Sasaran rencana pengembangan tersebut adalah:

- a. Mengusulkan pengembangan (menaikan) status Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kecamatan Suwawa sebagai Ibukota Kabupaten, menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), karena merupakan pusat pemerintahan, dan diarahkan pada perencanaan pusat jasa pelayanan keuangan/bank, simpul transportasi, dan pusat pelayanan jasa lainnya.
- b. Berkembangnya 3 (tiga) Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi: Kecamatan Tapa, Kabila, Tilongkabila.
- c. Berkembangnya 6 (enam) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi: Kecamatan Bone Pantai (Bilungala), Bone Raya (Mopiya), Bone (Taludaa), Kabila Bone (Huangobotu), Botupingge, dan Bulango Utara (Boidu).

1) PKL Tapa, Kabila, Tilongkabila dan Suwawa

Pusat-pusat kegiatan lokal di sekitar Kota Gorontalo (ibu kota provinsi) berdasarkan kecenderungan perkembangan sampai dengan saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan Kota Gorontalo. Sebagai akibatnya fungsi Kota Gorontalo sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) sudah meluas sampai ke wilayah Tapa, Kabila, Tilongkabila dan Suwawa. Hal ini yang melatarbelakangi Tapa, Kabila, Tilongkabila dan Suwawa ditetapkan termasuk dalam Pusat Kegiatan Lokal.

- 2) PPK Kecamatan Bone Pantai (Bilungala), Bone Raya (Mopiya), Bone (Taludaa), Kabila Bone (Huangobotu), Botupingge, dan Bulango Utara (Boidu). Kecamatan Bone Pantai (Bilungala), Bone Raya (Mopiya), Bone (Taludaa), Kabila Bone (Huangobotu), Botupingge, dan Bulango Utara (Boidu) ditetapkan sebagai PKL Bone Bolango

karena kecenderungan perkembangan perkotaan yang terjadi di kecamatan tersebut cukup intensif. Hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan pada berbagai sektor pembangunan yang cukup tinggi sebagai bagian dari wilayah PKL Bone Bolango. Kegiatan PKL saat ini pun menunjukkan kinerja perkembangan yang pesat yang diindikasikan dengan kinerja fungsi pelayanan di sektor perdagangan/jasa, pendidikan, kesehatan dan sosial. Kecamatan Bone Pantai memiliki persentase tingkat perdagangan dan jasa sebesar 60% dan Kecamatan Bulango Utara sebesar 39%.

3.4.1.1 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi Kabupaten Bone Bolango dititikberatkan pada pengembangan infrastruktur transportasi darat maupun laut, sehingga dapat menunjang sistem pusat pengembangan wilayah dan lokal Kabupaten Bone Bolango, dan menghasilkan pola jaringan transportasi yang terpadu, baik transportasi darat maupun transportasi laut. Pengembangan sistem prasarana transportasi diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dan mobilitas penduduk terutama pelaku pembangunan dan ekonomi terhadap pusat-pusat kegiatan produksi dan pemasaran, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Bone Bolango. Dengan demikian rencana pengembangan infrastruktur transportasi darat dan laut adalah:

1. Mengembangkan sistem jaringan arteri primer sebagai penghubung antar PKN dan antara PKN dan PKW.
2. Mengembangkan jalan kolektor primer sebagai penghubung antar PKW dan antara PKW dengan PKL.
3. Mengembangkan jaringan jalan by pass sebagai penghubung PKN.
4. Mengembangkan transportasi terpadu dalam rangka mendukung pengembangan PKN.
5. Mengembangkan pelabuhan untuk mendukung PKN dan PKW.

A. Rencana Pengembangan Infrastruktur Transportasi Darat

Rencana pengembangan infrastruktur jalan diarahkan pada rencana pembuatan jaringan jalan baru untuk meningkatkan akses antara wilayah yang ada di Kabupaten Bone Bolango dan wilayah sekitarnya. Bentuk jalan baru tersebut adalah jalan lingkar yang melintasi Kecamatan Kabila, Kecamatan Tilongkabila dan Kecamatan Suawa, jalan akses Aladi-Tulabolo, dan jalan akses Tulabolo-Pinogu. Rencana peningkatan fungsi dan kualitas jaringan jalan, diarahkan pada kegiatan peningkatan daya dukung perkerasan, pelebaran jalan, pengaspalan perkerasan jalan ataupun pelapisan ulang perkerasan jalan. Rencana fasilitas transportasi jalan raya diarahkan pada pengembangan perencanaan terminal kendaraan umum. Terminal yang direncanakan adalah terminal kendaraan umum tipe B di Desa Bulotalangi Kecamatan Tapa seluas 3 Ha dan tipe C di pusat Kota Suwawa seluas 2,5 Ha dan Kecamatan Bone Raya seluas 2,5 H. Fasilitas yang lain yaitu halte bus, pangkalan kendaraan umum, tempat pemberhentian kendaraan umum. Rencana pengembangan angkutan umum diarahkan pada penataan rute kendaraan umum meliputi rute angkutan umum dalam kota dan angkutan perdesaan.

B. Rencana Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut

Dalam konteks wilayah regional, saat ini Kabupaten Bone Bolango belum memerlukan pelabuhan laut yang berskala regional. Namun pelabuhan yang berskala lokal perlu dikembangkan, terutama untuk menghubungkan wilayah-wilayah antar kabupaten baik yang berada di Provinsi Gorontalo (Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato) maupun keluar Provinsi Gorontalo (Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). Untuk jangka panjang (20 tahun ke depan) untuk wilayah Kota Gorontalo sebagai ibukota provinsi, pelabuhan Kota Gorontalo secara teknis sulit dikembangkan karena terletak di muara Sungai Bone, yang sering mengalami pendangkalan akibat sedimentasi.

Pengembangan pembangunan pelabuhan laut yang berskala regional di Kabupaten Bone Bolango sebaiknya diarahkan untuk menggantikan fungsi pelabuhan Kota Gorontalo dalam melayani kebutuhan terutama untuk angkutan penumpang dan barang. Fungsi pelabuhan regional agar dapat menampung perkembangan arus orang dan barang, khususnya untuk menghubungkan Bone Bolango dengan wilayah Timur Indonesia, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur dan ke seluruh provinsi di Sulawesi. Rencana pembangunan parasarana transportasi laut adalah diarahkan pada pembangunan pelabuhan laut di Kabila Bone dan revitalisasi pangkalan pendaratan ikan (PPI) Inengo Kecamatan Kabila-Bone.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Arah dan strategi kebijakan pengembangan Perhubungan akan sangat di pengaruhi nilai-nilai strategis dan kondisi lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal Dinas Perhubungan.

Analisa terhadap lingkungan strategis internal maupun eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap pengembangan perhubungan dan pariwisata perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan langkah yang tepat dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengembangan bidang perhubungan dan pariwisata sesuai keadaan potensi bidang perhubungan dan pariwisata di Kabupaten Bone Bolango.

1. Lingkungan Internal

- a. Kekuatan (Strength)
 - 1) Tersedianya dasar hukum sebagai landasan operasional baik berupa perundang-undangan maupun pertun daerah
 - 2) Tersedianya struktur organisasi dan tata kerja
 - 3) Tersedianya SDA Dinas Perhubungan yang cukup memadai
 - 4) Terjalannya hubungan kerja yang baik dengan stake holder perhubungan
 - 5) Tersedianya jaringan internet untuk keperluan akses informasi

b. Kelemahan (Weaknesses)

- 1) Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki sertifikat pengujian
- 2) Masih kurangnya pelaksanaan diklat untuk meningkatkan kemampuan SDM
- 3) Masih kurangnya sarana dan prasarana di bidang Perhubungan Perhubungan darat dan bidang laut

2. Lingkungan Eksternal

c. Peluang (Opportunity)

- 1) Perkembangan teknologi informasi untuk keperluan analisis data
- 2) Tersedianya utilitas yang memadai (fasilitas RS, Bank, Kantor Pos, Listrik, Air Bersih dll)
- 3) Kondisi keamanan di Kabupaten Bone Bolango cukup menunjang
- 4) Tingkat kemacetan arus kendaraan masih minim

d. Ancaman (Threat)

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesadaran berlalulintas
- 2) Masih kurangnya pelaksanaan diklat untuk meningkatkan kemampuan SDM
- 3) Masih kurangnya sarana dan prasana penunjang di bidang perhubungan darat dan laut

Berdasarkan tabel berikut akan di jelaskan mengenai strategi yang akan di ambil Dinas Perhubungan berdasarkan Analisa SWOT :

Tabel Analisis SWOT pada Dinas Perhubungan

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
EKSTERNAL	1. Tersedianya dasar hukum sebagai landasan operasional baik berupa perundang-undangan maupun perturan daerah 2. Tersedianya jaringan internet untuk keperluan akses informasi 3. Tersedianya struktur organisasi dan tata kerja 4. Tersedianya sarana kerja yang memadai untuk menunjang	1. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki sertifikat pengujian 2. Masih kurangnya pelaksanaan diklat untuk meningkatkan kemampuan SDM 3. Masih kurangnya sarana da prasarana di bidang Perhubungan Perhubungan Darat dan Laut
INTERNAL		
PELUANG (O)	$S + O =$	$O + W =$
1. Munculnya Pengelolaan baru yaitu Bidang Perhubungan Laut 3. Perkembangan teknologi informasi untuk keperluan Analisis Data	1. peningkatan Kinerja Pelayanan Serta ketersediaan Data dengan memanfaatkan teknologi informasi 2. Peningkatan target PAD	1. mendorong ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi
ANCAMAN (T)	$S + T =$	$T + W =$

<p>1. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam tentang keselamatan dalam berlalu lintas</p> <p>2. Masih kurangnya pelaksanaan diklat untuk meningkatkan kemampuan SDM</p> <p>3. Masih kurangnya sarana dan prasana penunjang di bidang perhubungan darat dan laut</p>	<p>1. Mendorong peningkatan sarana dan prasarana di bidang perhubungan darat dan laut</p> <p>2. Mendorong terciptanya masyarakat sadar berlalu lintas</p> <p>3. Melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan Perhubungan</p>	<p>1. Merencanakan dan mengusulkan anggaran/kegiatan pengembangan Bidang Perhubungan darat dan laut</p>
---	--	---

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI DINAS PERHUBUNGAN

4.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Bone Bolango

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.

Dengan berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah maka Dinas Perhubungan menetapkan Visi dinas yaitu “ **Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Sektor Perhubungan Menuju Kabupaten Bone Bolango Cemerlang dan Sejahtera 2021** “

Sedangkan Misi dari Dinas perhubungan yang berdasarkan kesesuaian dengan Misi Kepala Daerah yaitu “ **Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur pada sektor Perhubungan** “

4.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 6 (enam) tahunan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan rumusan misi sebagaimana tertuang diatas adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pada sektor Perhubungan

Sasaran :

1. Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi.
2. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang konektivitas dan Aksesibilitas pada sektor perhubungan

4.3 Strategi dan Kebijakan

Arah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan mengacu kepada Visi dan Misi daerah dalam mewujudkan pembangunan menuju Kabupaten Bone Bolango Cemerlang dan Sejahtera 2021, yang arahnya adalah sebagaimana tabel berikut :

Misi Pertama: Mewujudkan percepatan pembangunan Infrastruktur pada sektor Perhubungan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pada sektor Perhubungan	1.1 Meningkatnya Pembangunan infrastruktur Perhubungan	1.1.1 Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang Profesional dan berkinerja Tinggi	1. Nilai SAKIP 2. Tingkat penyerapan anggaran 3. Temuan material hasil temuan inspektorat dan BPK 4. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk lingkup Dinas Perhubungan yang didukung dengan kualitas dan kuantitas data dan informasi; 2 Meningkatkan kompetensi aparatur yang berkualitas dan handal serta profesional berupa diklat dan bimtek	1. Penerapan dokumen sisdur perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk lingkup SKPD; 2. Peningkatan dukungan manajemen tenaga aparatur yang handal pada SKPD; 3. Adanya dukungan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana 4. Penyajian laporan kepegawaian dan keuangan sesuai peraturan yang berlaku

		1.1.2 Tersedianya sarana dan prasarana pada sektor Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan 2. Jumlah kendaraan 	<ol style="list-style-type: none"> 3 Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai 4 Menyediakan akses yang mudah dan lengkap terhadap informasi administrasi kepegawaian dan keuangan aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kondisi prasarana jalan dalam upaya mempertahankan tingkat pelayanan (<i>level of service</i>), kenyamanan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian, pengawasan dan pengelolaan bidang transportasi perhubungan yang
--	--	--	---	---	---	--

			<p>yang memenuhi kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</p> <p>3. Penurunan angka kecelakaan lalu lintas</p>	<p>keamanan pemakaian jalan;</p> <p>2. Peningkatan kemampuan daya dukung prasarana perhubungan</p> <p>3. Menambah jumlah angkutan perintis pedesaan</p>	<p>menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas;</p> <p>2. Pembangunan fasilitas penunjang sarana dan prasarana lalu lintas;</p> <p>3. Memprioritaskan peran pemerintah dalam dukungan anggaran pengadaan angkutan desa</p>
--	--	--	---	---	--

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra Dinas Perhubungan tahun 2016-2021, Program dan Kegiatan dikategorikan ke dalam Program/Kegiatan lokalitas SKPD, Program/Kegiatan lintas SKPD dan Program/Kegiatan Kewilayahan.

Program/Kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Kewilayahan dan lintas wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar kementerian/lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan

Program dan Kegiatan

Program serta kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2016 – 2021 baik dalam bentuk penjabaran maupun matriks, disusun sebagai berikut :

a. Bidang Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut

- **Program** Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
 - Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan.
 - Kegiatan Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan.
 - Kegiatan Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

b. Bidang Prasarana dan Keselamatan Transportasi

- **Program** Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
 - Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal.
- **Program** Peningkatan dan pengamanan lalu lintas
 - Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas.

- Kegiatan Pengadaan Marka Jalan
- Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
- **Program** Peningkatan Kelaikan Pengoperasian kendaraan bermotor.
- Kegiatan Pengadaan Balai Uji Kendaraan Bermotor.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran RPJMD. Secara umum indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bone Bolango. Yaitu

1. Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan
2. Persentase jumlah kendaraan yang memenuhi kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
3. Penurunan angka kecelakaan lalu lintas
4. Nilai SKIP
5. Tingkat Penyerapan anggaran
6. Temuan material hasil temuan inspektorat dan BPK
7. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat

6.2 Tujuan

Berdasarkan indikator kinerja yang telah dibuat maka Dinas Perhubungan Kab. Bone Bolango menetapkan tujuan berdasarkan hasil dari RPJMD Kabupaten Bone Bolango yaitu **“Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur pada sektor Perhubungan”**

6.3 Sasaran

Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango menetapkan sasaran yang ingin dicapai hingga akhir tahun 2021 sebagai berikut :

1. Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi.

2. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang konektivitas dan aksesibilitas pada sektor Perhubungan.

Adapun Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango yang mengacu pada RPJMD disajikan dalam tabel Berikut

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada priode awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir priode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Tersedianya sarana dan prasarana pada sektor perhubungan	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan	40%	50%	60%	70%	80%	90%	90%
		Persentase Jumlah kendaraan yang memenuhi kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	32%	40%	55%	75%	80%	90%	90%
		Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	10%	7%	6%	5%	4%	3%	3%

2	Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi	Nilai SAKIP	CC	B	BB	BB	A	AA	AA
		Tingkat penyerapan anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Temuan material hasil temuan Inspektorat dan BPK	0	0	0	0	0	0	0
		Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	60	65	70	75	80	85	85

BAB VI PENUTUP

Penyusunan rencana strategi pembangunan daerah (RENSTRA) Dinas Perhubungan sebagai bahan acuan pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menjalankan program serta kegiatan.

Untuk itu program serta kegiatan yang ada merupakan tolak ukur dalam menjalankan pemerintahan enam tahun kedepan dan sebagai acuan yang diambil sudah tercakup dalam Rencana Strategi Pembangunan Daerah ini.

Demikianlah penyusunan Renstra ini di susun sebagai pedoman dalam menjalankan program-program pemerintah yang terarah sehingga mampu menjadi Tiga andalan utama kegiatan ekonomi kemasyarakatan serta menjadikan masyarakat menuju pada Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan Menuju masyarakat Kabupaten Bone Bolango Cemerlang dan Sejahtera 2021.

KEPALA DINAS

Hi. DJAMALUDIN WARTABONE, S.Pd., MM. Pub

NIP. 19600612 198903 1 022

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran yang maha kuasa, karena hanya dengan perkenanNya Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bo telah menyelesaikan penyusunan RENSTRA 2016-2021.

RENSTRA ini disusun berdasarkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango yang selalu berpedoman pada visi dan misi daerah Kabupaten Bone Bolango untuk dapat menjadikan daerah ini sebagai daerah maju yang mampu memberikan pelayanan, pengawasan serta pengayoman kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Bone Bolango.

Untuk itu perlu satu program pemerintah yang perlu dirancang dengan dasar APBD dalam pengembangan kelembagaan di Kabupaten Bone Bolango yang dapat memberikan Income (pendapatan) kepada Negara RI khususnya Kabupaten Bone Bolango.

Dengan harapan mendapat dukungan dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, Praktisi, Akademis, Masyarakat, Agama dan Budaya. Mengingat Perhubungan ini sebagai industri yang menyentuh semua sektor ekonomi (Multi Effect) sehingga kemajuan dan perkembangan daerah mendapat image positif dari masyarakat.

**KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN**

Hi. DJAMALUDIN WARTABONE, S.Pd., MM. Pub

NIP. 19600612 198903 1 022

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD	5
2.1 Struktur Organisasi	5
2.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan.....	5
Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.....	20
3.1 Kondisi Daerah Masa kini.....	20
3.2 Kondisi yang diinginkan dan Prokesi Kedepan.....	20
Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan	22
4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	22
4.2 Tujuan dan Sasaran.....	22
4.3 Strategi dan Kebijakan.....	24
Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikatpr Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	23
Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	27
BAB VII Penutup	37

LAMPIARAN-LAMPIRAN

MATRIKS VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Instansi : Dinas Perhubungan
Kabupaten : Bone Bolango

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Sektor Perhubungan Menuju Kabupaten Bone Bolango Cemerlang dan Sejahtera 2021	Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur pada sektor Perhubungan	1.1 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pada sektor Perhubungan	1.1.1 Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang Profesional dan berkinerja Tinggi	1 Penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk lingkup Dinas Perhubungan yang didukung dengan kualitas dan kuantitas data dan informasi; 2 Meningkatkan	1. Penerapan dokumen sisdur perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk lingkup SKPD; 2. Peningkatan dukungan manajemen tenaga aparatur yang handal pada SKPD; 3. Adanya dukungan

				<p>kompentensi aparaturn yang berkualitas dan handal serta profesional berupa diklat dan bimtek</p> <p>3 Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai</p> <p>4 Menyediakan akses yang mudah dan lengkap terhadap informasi</p>	<p>anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana</p> <p>4. Penyajian laporan kepegawaian dan keuangan sesuai peraturan yang berlaku</p>
--	--	--	--	---	--

			1.1.2 Tersedianya sarana dan prasarana pada sektor Perhubungan	administrasi kepegawaian dan keuangan aparatur 1. Peningkatan kondisi prasarana jalan dalam upaya mempertahankan tingkat pelayanan (<i>level of service</i>), kenyamanan dan keamanan pemakaian jalan; 2. Peningkatan kemampuan daya	1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian, pengawasan dan pengelolaan bidang transportasi perhubungan yang menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
--	--	--	--	--	---

				dukung prasarana perhubungan 3. Menambah jumlah angkutan perintis pedesaan	2. Pembangunan fasilitas penunjang prasarana lalu lintas; 3. Memprioritaskan peran pemerintah dalam dukungan anggaran pengadaan angkutan desa

MATRIKS PENCAPAIAN TUJUAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pada sektor Perhubungan	Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang Profesional dan berkinerja Tinggi	1	Penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk lingkup Dinas Perhubungan yang didukung dengan kualitas dan kuantitas data dan informasi;	1. Penerapan dokumen sisdur perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk lingkup SKPD;	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan penyediaan administrasi perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan	12 Dok
				2. Peningkatan dukungan manajemen tenaga aparatur yang handal pada SKPD;		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi yang dilakukan	12 Dok
		2	Meningkatkan kompetensi aparatur yang berkualitas dan handal serta profesional berupa diklat	3. Adanya dukungan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	6 unit
			4. Penyajian laporan kepegawaian dan					

		dan bimtek	keuangan sesuai		Pemeliharaan	Jumlah kendaran	4 unit
		3 Mewujudkan	peraturan yang		rutin/berkala	dinas/operasional yang	
		ketersediaan	berlaku		kendaraan	dipelihara	
		sarana dan			dinas/operasional		
		prasarana kerja					
		yang memadai			Pengadaan dan	Jumlah	12 unit
		4 Menyediakan			pemeliharaan	perlengkapan/peralatan	
		akses yang			perlengkapan/peralatan	gedung kantor yang	
		mudah dan			gedung kantor	dipelihara	
		lengkap					
		terhadap				Jumlah	10 unit
		informasi				perlengkapan/peralatan	
		administrasi				gedung kantor yang	
		kepegawaian				diadakan	
		dan keuangan					
		aparatur					
				Peningkatan	Pengadaan pakaian	Jumlah ASN dan	100 orang
				disiplin	dinas, pakaian khusus	tenaga kontrak	
				aparatur	dan pakaian kerja		
					lapangan		
				Peningkatan	Pendidikan dan	Jumlah ASN yang	7 org
				kapasitas	pelatihan formal	ditingkatkan	
				sumber daya		kapasitasnya	

				aparatur			
				Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 dok
	Tersedianya sarana dan prasarana pada sektor Perhubungan	1. Peningkatan kondisi prasarana jalan dalam upaya mempertahankan tingkat pelayanan (<i>level of service</i>), kenyamanan dan keamanan pemakaian jalan; 2. Peningkatan kemampuan daya	1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian, pengawasan dan pengelolaan bidang transportasi perhubungan yang menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas; 2. Pembangunan	Peningkatan pelayanan angkutan	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/kuru mudi/awak kendaraan umum	Jumlah dokumen pengendalian disiplin angkutan umum di jalan raya Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Jumlah peserta Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/kuru mudi/awak	12 dok 100 org 60 org

		dukung prasarana perhubungan 3. Menambah jumlah angkutan perintis pedesaan	fasilitas penunjang prasarana lalu lintas; 3. Memprioritaskan peran pemerintah dalam dukungan anggaran pengadaan angkutan desa	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	teladan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Pembangunan gedung terminal Pengadaan balai uji kendaraan bermotor Pengadaan marka jalan Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	kendaraan umum teladan Jumlah koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Jumlah gedung terminal yang di bangun Jumlah balai uji yang di bangun Jumlah marka jalan yang diadakan Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang diadakan	4 dok 100 buah
--	--	---	---	--	---	--	---

MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN TARGET

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Indikator					Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	
	Program Peningkatan Pelayanan angkutan	Jumlah angkutan yang layak jalan	%	39	40	55	75	80	90	
	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Jumlah dokumen pengendalian disiplin angkutan umu di jalan raya	dok	12	12	12	12	12	12	
	Kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	org	50	100	100	100	100	100	
	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umu teladan	Jumlah peserta pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan umum teladan	org	50	0	60	70	80	80	
	Kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	dok	0	4	4	4	4	4	
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase terpenuhinya kebutuhan saran dan prasarana perhubungan	%	40	50	60	70	80	90	
	Kegiatan pembangunan gedung terminal	Jumlah gedung terminal yang di bangun	unit	0	1	1	1	1	1	
	Program Peningkatan	Jumlah penurunan angka kecelakaan	Kasus	114	100	90	80	70	60	

	Pengamanan Lalu Lintas	lalu lintas								
	Kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang diadakan	Buah	100	100	100	100	100	100	
	Kegiatan pengadaan marka jalan	Jumlah marka jalan yang diadakan	Meter		0	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Kelaikan pengoperasian Kendaraan bermotor	%	40	50	60	70	80	90	
	Kegiatan pembangunan balai uji	Jumlah balai uji yang di bangun	unit	0	1	1	1	1	1	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran yang berkualitas	%	15	15	17	20	22	23	
	Kegiatan penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan	dok	12	12	12	12	12	12	
	Kegiatan rapat-rapat koordinasi di dalam dan di luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	dok	12	12	12	12	12	12	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya	%	15	15	17	20	22	23	
	Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	unit		0	0	2	2	2	
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang	unit	8	8	8	8	8	8	

RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KAB.BONE BOLANGO 2016-2021

	kendaraan dinas/operasional	dipelihara								
	Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan gedung kantor yang diadakan dan dipelihara	Unit bulan	10 12	10 12	10 12	10 12	10 12	10 12	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase capaian ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	15	15	17	20	22	23	
	Kegiatan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian kerja lapangan	Jumlah ASN dan tenaga kontrak	org	100	100	100	100	100	100	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase capaian ASN yang ditingkatkan kapsitasnya	%	15	15	17	20	22	23	
	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN	org	7	7	7	7	7	7	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen hasil pelaksanaan program kegiatan perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan tahun berikutnya	%	20	20	20	20	20	20	
	Kegiatan Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan realisasi ikhtisar kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dok	10	10	10	10	10	10	

**MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATIF TAHUNAN**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikasi Pagu Anggaran				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Program Peningkatan Pelayanan angkutan	Persentase angkutan yang layak jalan	259.503.300	405.072.977	425.284.626	446.548.857	527.248.024
	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Jumlah dokumen pengendalian disiplin angkutan umu di jalan raya	249.003.300	261.453.465	274.526.138	288.252.445	302.665.067
	Kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan		71.106.013	74.661.314	78.394.379	82.314.319
	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umu teladan	Jumlah peserta pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan umum teladan		61.448.499	64.520.924	67.746.970	71.134.319
	Kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	10.500.000	11.025.000	11.576.250	12.155.063	12.762.816
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase terpenuhinya kebutuhan saran dan prasarana perhubungan	308.889.000	324.333.450	340.550.000	357.577/629	375.456.510
	Kegiatan pembangunan gedung terminal	Jumlah gedung terminal yang di bangun	308.889.000	324.333.450	340.550.000	357.577.629	375.456.510
	Program Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah penurunan angka kecelakaan lalu lintas	1.516.214.700	2.279.525.435	2.498.501.707	2.623.426.791	2.754.598.132

RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KAB.BONE BOLANGO 2016-2021

	Kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang diadakan	1.516.214.700	1.592.025.435	1.671.626.707	1.755.208.041	1.842.968.444
	Kegiatan pengadaan marka jalan	Jumlah marka jalan yang diadakan		787.500.000	826.875.000	868.218.750	911.629.688
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Kelaikan pengoperasian Kendaraan bermotor		800.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	Kegiatan pembangunan balai uji	Jumlah balai uji yang di bangun		800.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran yang berkualitas	1.018.773.525	1.069.712.202	1.123.197.811	1.179.357.702	1.238.325.587
	Kegiatan penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan	765.396.975	803.666.824	843.850.165	886.042.673	930.344.807
	Kegiatan rapat-rapat koordinasi di dalam dan di luar daerah	Jumlah dokumen rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	253.376.550	266.045.378	279.347.646	293.315.029	307.980.780
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya	414.041.000	554.743000	556.480.000	579.303.000	603.111.000
	Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		120.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	181.125.000	190.181.000	199.690.000	209.674.000	220.160.000
	Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan	Jumlah perlengkapan/peralatan	232.916.000	244.562.000	256.790.000	269.629.000	283.111.000

RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KAB.BONE BOLANGO 2016-2021

	perlengkapan/peralatan gedung kantor	gedung kantor yang diadakan dan dipelihara					
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase capaian ASN yang ditingkatkan kompetensinya	61.425.000	65.196.000	70.256.000	75.346.000	80.145.000
	Kegiatan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian kerja lapangan	Jumlah ASN dan tenaga kontrak	61.425.000	65.496.000	70.256.000	75.346.000	80.145.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase capaian ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	120.955.000	125.452.000	150.578.000	175.231.000	180.276.000
	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN	120.955.000	125.452.000	150.578.000	175.231.000	180.276.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen hasil pelaksanaan program kegiatan perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan tahun berikutnya	154.857.000	162.600.000	170.730.000	179.267.000	188.230.000
	Kegiatan Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan realisasi ikhtisar kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	154.857.000	162.600.000	170.730.000	179.267.000	188.230.000